



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 88.4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYESUAIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DENGAN INSTANSI INDUK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penyesuaian Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dengan instansi induk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penyesuaian Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dengan Instansi Induk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DENGAN INSTANSI INDUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
10. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
11. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
12. Instansi Induk adalah Instansi pembina dan penanggungjawab Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu;
14. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
15. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Siak;
17. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kabupaten Siak;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Instansi induk sesuai dengan kewenangannya.
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi induknya.

Pasal 3

Unit pelaksana teknis Dinas/Badan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

BAB III
ESELON
Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kasubbag Tata Usaha, dan Petugas Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Instansi induknya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Kasubbag Tata Usaha dan Petugas Operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada instansi induk maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dibebankan pada anggaran Instansi induknya dan sumber lain yang dianggap sah.

BAB VII
INSTANSI INDUK
Pasal 8

Instansi induk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang sudah terbentuk tidak berubah dan tetap melaksanakan tugas serta bertanggungjawab pada instansi induk yang telah disesuaikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

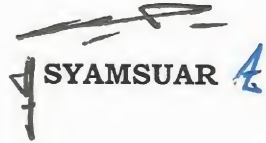
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 88.4

Lampiran : Peraturan Bupati Siak**Nomor : 08.a Tahun 2016****Tanggal : 29 November 2016****INSTANSI INDUK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN YANG TELAH DISESUAIKAN**

No.	NAMA UPTD/UPTB	INSTANSI INDUK SEBELUM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016	INSTANSI INDUK SETELAH PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016	KET
1	2	3	4	5
1.	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	UPTD Perhubungan dan Infokom	Dinas Perhubungan dan Infokom	Dinas Perhubungan	
3.	UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4.	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
5.	UPTD Bina Marga dan Pengairan	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
6.	UPTD Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Pertanian	
7.	UPTD Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian	
8.	UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Dinas Peternakan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Perternakan	
9.	UPTD Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah	
10.	UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

1	2	3	4	5
11.	UPTB Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian	
12.	UPTB Balai Penyuluh Pertanian Datuk Tanah Datar	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian	
13.	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
14.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
15.	UPTD Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
16.	UPTD Metrologi Legal	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
17.	UPTD Balai Latihan Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**